

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Adji, Indriyanto Seno. 2015. *Pra Peradilan & KUHP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media.
- Darmono. 2013. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ester, Lalola. 2016. *Eksaminasi Putusan Gugatan Praperadilan Budi Gunawan dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Tri Astuti. 2018. *Hukum Acara Pidana, Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Bandung: Nusa Media.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Ilyas, Amir dan Nusa, Apriyanto. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Machmuddin, Dudu Duswara. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama: Bandung.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

- Nugroho, Hibnu. 2012. *Intergralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- _____ dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Surachmin dan Cahaya, Suhandi. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M.. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). 2015. *Anotasi Putusan Perkara Kasus Praperadilan Penetapan Tersangka Nomor Register Perkara: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel (Komjen Budi Gunawan)*. Depok: MaPPI FHUI.
- Warsito, Iwan Anggoro. 2015. *Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. 1981. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LN Nomor 76 Tahun 1981. TLN Nomor 3209.
- _____. 2001. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. LN Nomor 134 Tahun 2001. TLN Nomor 4150.
- _____. 2002. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. LN Nomor 137 Tahun 2002. TLN Nomor 4250.

_____. 2009. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. LN Nomor 3 Tahun 2009. TLN Nomor 4958.

_____. 2009. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN Nomor 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Larangan Pengajuan Kembali Putusan Praperadilan*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 596.

Kepolisian Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429.

_____. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Nomor Surat 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 67/Pid/TPK/2014/PT.DKI (diunduh pada tanggal 16 September 2018 pada direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. (diunduh pada tanggal 25 Februari 2018 pada direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. (diunduh pada tanggal 24 Desember 2018 pada direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>).

D. Jurnal Ilmiah

- Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2*.
- Afrialdo, Masrizal. 2016. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh". *JOM Fakultas Hukum Vol. III*.
- Amdani, Yusi. 2015. "Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 Nomor 3*.
- Anditya, Ariesta Wibisono. 2018. "Pemeriksaan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Praperadilan dalam Konstelasi Pancasila". *Jurnal Hukum Justitia Et Pax Volume 34 Nomor 1*.
- Ang, Debby Natalia. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 1*.
- Bahrn. 2017. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Syariah Vol. XVII No. 2*.
- Bawono, Bambang Tri. 2011. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan". *Jurnal Hukum Vol. XXVI No. 2*.
- Djaman, Prasetyo Darmansyah Putra. 2013. "Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polresta Palu)". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 Volume 1*.
- Jaya, Eka Nanda Rahmat. 2018. "Kewenangan Hakim Praperadilan Studi Kasus Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL". *Jurnal Jurist-Diction Volume 1 No. 1*.
- Kaligis, Rovani. 2013. "Fungsi Penyelidikan dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 4*.
- Ketaren, Siti Maimana Sari, dkk. 2013. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan". *USU Law Journal Vol. II No. 2*.

- Lapasi, Daud. 2013. "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup". *Lex et Societatis Vol. IV No. 2*.
- Majampoh, Gerald. 2013. "Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya". *Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 1*.
- Moeliono, Tristam P. dan Wulandari, Widati. 2015. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No. 4*.
- Mulingka, Firman A. 2015. "Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim". *Lex Administratum Vol. III No. 6*.
- Parikesit, Iqbal, dkk. 2017. "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Diponegoro Jurnal Vol. 6 No. 1*.
- Permana, L. Hendi. 2016. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Hukum*.
- Priono, Agus. 2017. "Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2*.
- Rahmadi, Aji. 2018. "Penetapan Tersangka Baru dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL)". *Jurnal Hukum Jurisprudence Vol. 8 No. 2*.
- Ramiyanto. 2015. "Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan". *Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2*.
- Rifai, Eddy. 2013. "Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)". *Jurnal Konstitusi Vol. X No. 1*.
- Silalahi, Afandi Maruli dan I. Tajudin. 2018. "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka". *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. II No. 2*.
- Surya, Achmad. 2018. "Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah". *Jurnal Hukum Resam STIH Muhammadiyah Aceh Tengah Volume 4 Nomor 1*.
- Winarno, Nur Basuki. 2011. "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian". *Jurnal Perspektif Vol. XVI No. 2*.

E. Lain-lain

The Magna Charta (diunduh pada tanggal 9 Desember 2018 pada <https://www.constitution.org>).

Artikel Berita Berjudul “Ketua MA: Putusan Hakim Praperadilan Kasus Century Itu Salah”. <http://mediaindonesia.com/read/detail/157460-ketua-ma-putusan-hakim-praperadilan-kasus-century-itu-salah>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2019.